

RENCANA KERJA
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2020



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan penjabaran secara konkrit dan sistematis dari Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan prioritas Program Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagai bahan acuan untuk melaksanakan kegiatan.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat dengan harapan dapat dijadikan sebagai acuan rencana tindak lanjut.

Palangka Raya, Mei 2019

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Drs. SUHAEMI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640905 199303 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	26
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	27
3.3 Program dan Kegiatan	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....	34
BAB V PENUTUP	35
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja OPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansi penerjemahan visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 selain itu Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi.

Setiap OPD diwajibkan menyusun dokumen 1 (satu) tahun tersebut seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 27 bahwa setiap OPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja) yang disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
- g. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
- k. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- l. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

- 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
- m. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- o. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/516/DPA-SKPD/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.
- r. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 050/105/II/Bapplitbang Tanggal 11 Februari 2019 perihal Penyusunan Rancangan Awal Renja-PD Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020, sedangkan tujuan penetapan rencana kerja ini adalah :

- a. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
- b. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh para pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
- c. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.
- d. Untuk memasukan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari 9 program dan 59 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018, realisasi dari target yang telah ditetapkan adalah 89,75% dan realisasi anggaran sebesar 88,95%. secara keseluruhan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2018 (n-2) dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Review Hasil Evaluasi Renja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (-2)			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (tahun n-1) 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2017 (tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2017 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan IV tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Triwulan IV tahun 2018 (%)	
	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 (10/4)	12
	Urusan Wajib										
	Penanaman Modal										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Perangko dan Materai	58,000	8,000	8,000	8,000	100.00	8,000	24,000	41.38	DPM-PTSP
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Biaya Telepon, Listrik, Internet, TV Kabel dan OK Vision	30	5	5	5	100.00	4	14	46.67	DPM-PTSP
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah jasa jaminan milik daerah	12	2	2	2	100.00	2	6	50.00	DPM-PTSP
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan,	560	55	101	86	85.15	37	178	31.79	DPM-PTSP

	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan	24	4	4	4	100.00	4	12	50.00	DPM-PTSP
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	55	-	-	-	-	-	-	0.00	DPM-PTSP
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	54	9	9	9	100.00	9	27	50.00	DPM-PTSP
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	160	25	25	25	100.00	11	61	38.13	DPM-PTSP
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	8,366	1,080	1,446	1,446	100.00	533	3,059	36.56	DPM-PTSP
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bendera dan umbul-umbul	173	-	32	32	100.00	25	57	32.95	DPM-PTSP
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	4,900	300	216	216	100.00	245	761	15.53	DPM-PTSP
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman	3,981	420	555	550	99.10	526	1,496	37.58	DPM-PTSP
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah dokumen rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	162	20	27	27	100.00	27	74	45.68	DPM-PTSP
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah dokumen rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	130	15	20	20	100.00	20	55	42.31	DPM-PTSP
	Rujukan Berobat PNS	Jumlah PNS yang								13.33	DPM-PTSP

		dijamin	30	1	5	1	20.00	2	4		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional	2	-	-	-	-	1	1	50.00	DPM-PTSP
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	30	-	-	-	-	6	6	20.00	DPM-PTSP
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	18	3	3	3	100.00	10	16	88.89	DPM-PTSP
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	18	3	3	3	100.00	3	9	50.00	DPM-PTSP
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan, BBM, Perpanjangan STNK Kendaraan roda 4 dan roda 2	36	6	6	6	100.00	6	18	50.00	DPM-PTSP
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	66	7	11	11	100.00	11	29	43.94	DPM-PTSP
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah perbaikan peralatan gedung kantor	17	3	2	2	100.00	3	8	47.06	DPM-PTSP
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehab sedang/berat gedung kantor	8	1	3	3	100.00	1	5	62.50	DPM-PTSP

	Program Peningkatan disiplin aparatur										
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	285	-	-	-	-	77	77	27.02	DPM-PTSP
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	460	76	76	76	100.00	78	230	50.00	DPM-PTSP
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan	90	15	15	14	93.33	15	44	48.89	DPM-PTSP
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	43	7	7	7	100.00	-	14	32.56	DPM-PTSP
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek	92	12	15	15	100.00	-	27	29.35	DPM-PTSP
	Mengikuti workshop/seminar	Jumlah pegawai yang mengikuti workshop/seminar	36	-	-	-	-	12	12	33.33	DPM-PTSP
	Mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek/ sosialisasi	45	-	-	-	-	15	15	33.33	DPM-PTSP
	Kaji banding pelayanan perizinan	Jumlah pegawai yang mengikuti kaji banding pelayanan perizinan	45	-	-	-	-	15	15	33.33	DPM-PTSP

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	150	25	25	25	100.00	25	75	50.00	DPM-PTSP
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	120	20	20	20	100.00	20	60	50.00	DPM-PTSP
	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen LAKIP	150	25	25	25	100.00	25	75	50.00	DPM-PTSP
	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen Renja dan Renstra	300	50	50	50	100.00	50	150	50.00	DPM-PTSP
	Penyusunan laporan aktiva tetap, persediaan barang dan barang pakai habis	Jumlah laporan aktiva tetap	150	25	25	25	100.00	25	75	50.00	DPM-PTSP
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah dokumen LPPD	145	20	25	25	100.00	25	70	48.28	DPM-PTSP
	Penyusunan Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ	140	20	20	20	100.00	20	60	42.86	DPM-PTSP
	Inventarisasi/pendataan barang milik daerah (BMD)	Jumlah inventarisasi BMD	-	-	-	-	-	-	-	0.00	DPM-PTSP

	Program Pameran Promosi Investasi										
	Pameran promosi investasi di dalam negeri	Jumlah pameran investasi di dalam negeri	31	1	4	4	100.00	3	8	25.81	DPM-PTSP
	Regional Invesment Forum (RIF)	Jumlah kegiatan regional invesment forum (RIF)	9	-	2	2	100.00	2	4	44.44	DPM-PTSP
	Kalimantan Tengah Expo di Palangka Raya	Jumlah Kalimantan Tengah Expo di Palangka Raya	6	1	1	1	100.00	-	2	33.33	DPM-PTSP
	Kalimantan Tengah quality expo	Jumlah Kalimantan Tengah quality expo	3	-	-	-	-	1	1	33.33	DPM-PTSP
	Kalimantan Tengah trade expo	Jumlah Kalimantan Tengah trade expo	3	-	-	-	-	1	1	33.33	DPM-PTSP
	Gelar karya Kalteng	Jumlah gelar karya Kalteng	3	-	-	-	-	1	1	33.33	DPM-PTSP
	Program Capaian Realisasi Investasi										
	Evaluasi Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM)	Jumlah laporan kinerja penanaman modal (LKPM)	60	-	12	12	100.00	12	24	40.00	DPM-PTSP
	Satuan tugas (task force) penanaman modal se Kalimantan Tengah	Jumlah BAP satuan tugas (task force) penanaman modal	121	11	14	14	100.00	2	27	22.31	DPM-PTSP

	Inventarisasi dan evaluasi fasilitas barang modal (masterlist) yang di impor oleh perusahaan PMA/PMDN	Jumlah fasilitas barang modal (masterlist) yang diinventarisasi dan dievaluasi pada perusahaan PMA/PMDN	30	-	-	-	-	10	10	33.33	DPM-PTSP
	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perusahaan PMA/PMDN	Jumlah laporan kegiatan proyek yang dilakukan Pembinaan dan Pengendalian pada perusahaan PMA/PMDN	141	8	12	12	100.00	12	32	22.70	DPM-PTSP
	Program Perencanaan dan Pengembangan Potensi Investasi Daerah										
	Rapat koordinasi dan evaluasi perencanaan penanaman modal daerah se Kalteng	Jumlah peserta RKEPPMD se Kalteng	240	37	40	40	100.00	40	117	48.75	DPM-PTSP
	Kajian Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen RUPM Kalteng Tahun 2015 yang di Kaji	70	-	14	14	100.00	-	14	20.00	DPM-PTSP
	Mukor/KP3MN dengan IPMP/ IPMK se Indonesia	Jumlah peserta Mukor/ KP3MN se Indonesia	42	7	11	11	100.00	11	29	69.05	DPM-PTSP
	Inventarisasi dan pendataan rencana program dan kegiatan	Jumlah data program dan kegiatan ke Kabupaten/ Kota	26	-	6	6	100.00	5	11	42.31	DPM-PTSP

	Sinkronisasi dan Evaluasi Penyusunan Program dan Kegiatan	Jumlah sinkronisasi dan evaluasi penyusunan program dan kegiatan	24	10	-	-	-	-	10	41.67	DPM-PTSP
	Pengembangan SIPID melalui Website	Jumlah aparatur yang mengikuti Pengembangan SIPID melalui Website	44	-	4	4	100.00	-	4	9.09	DPM-PTSP
	Inventarisasi Potensi Unggulan Daerah dan Peta Potensi Investasi	Jumlah Data Potensi Unggulan Daerah dan Peta Potensi Investasi	32	-	14	14	100.00	-	14	43.75	DPM-PTSP
	Penyusunan Sistem Informasi melalui Web Secara Online	Jumlah sistem informasi	2	-	1	1	100.00	-	1	50.00	DPM-PTSP
	Pembuatan peta potensi dan peluang investasi	Jumlah peta potensi dan peluang investasi	14	-	-	-	-	4	4	28.57	DPM-PTSP
	Mengikuti pemutahiran data sistem informasi potensi investasi daerah (SIPID)	Jumlah aparatur yang mengikuti pemutahiran data SIPID	9	-	-	-	-	3	3	33.33	DPM-PTSP
	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Informasi Publik										
	Cek lapangan dalam rangka proses pelayanan perizinan	Jumlah perizinan yang dikeluarkan 13 kabupaten	84	9	12	12	100.00	17	38	45.24	DPM-PTSP

	Pendataan jenis dan jumlah perizinan PMA/PMDN se Kalteng	Jumlah perizinan PMA/ PMDN se Kalteng di 13 Kabupaten	2,362	13	13	13	100.00	13	39	1.65	DPM-PTSP
	Pengadaan Leaflet/Booklet untuk PTSP	Jumlah Leaflet/Booklet	56,250	-	580	580	100.00	-	580	1.03	DPM-PTSP
	Sosialisasi Pergub PTSP di Bidang Penanaman Modal	Pelaku Usaha, Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	500	100	100	100	100.00	-	200	40.00	DPM-PTSP
	Pengadaan SPP dan SOP untuk PTSP	Jumlah SPP dan SOP untuk PTSP	500	-	90	-	-	244	244	48.80	DPM-PTSP
	Pelayanan informasi PTSP dan informasi publik	Jumlah media cetak dan media elektronik	15	6	3	3	100.00	3	12	80.00	DPM-PTSP
	Forum/Sosialisasi PTSP di bidang penanaman modal	Jumlah peserta forum PTSP di bidang penanaman modal	600	1	50	50	100.00	30	81	13.50	DPM-PTSP
	Penyediaan tenaga pengelola PTSP	Jumlah tenaga pengelola PTSP	159	-	-	-	-	53	53	33.33	DPM-PTSP
	Koordinasi dan fasilitasi pengaduan perizinan dan non perizinan	Jumlah pengaduan perizinan dan non perizinan	50	-	12	10	83.33	17	27	54.00	DPM-PTSP
	Pengadaan videotron dan content	Jumlah videotron dan content	1	-	-	-	-	1	1	100.00	DPM-PTSP
	Pengadaan sistem informasi penanaman modal dan perizinan dan server	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	1	-	-	-	-	1	1	100.00	DPM-PTSP

Tabel 2.2
Realisasi Kegiatan Tahun 2018

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.</i>			
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	40.000.000	40.000.000	100
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	421.913.273	339.159.004	80,39
3.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah.	30.000.000	26.272.000	87,57
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.	1.116.960.000	1.102.034.000	98,66
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	165.800.000	165.456.500	99,79
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	145.459.900	145.459.500	100
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	107.542.000	107.120.900	99,61
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	35.000.000	34.990.000	99,97
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	30.000.000	29.600.000	98,67
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	25.000.000	21.060.000	84,24
11.	Penyediaan Makanan dan Minuman.	20.000.000	19.660.000	98,30
12.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.	422.621.800	420.769.002	99,56
13.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.	250.000.000	248.333.087	99,33
14.	Rujukan Berobat PNS.	19.423.650	5.425.000	27,93
II	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.</i>			
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.	550.000.000	523.993.600	95,27

1	2	3	4	5
2.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.	855.000.000	777.700.000	90,96
3.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.	1.290.180.000	1.141.932.085	88,51
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.	70.000.000	68.050.000	97,21
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	100.000.000	97.163.796	97,16
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.	89.000.000	88.709.000	99,67
7.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.	67.000.000	54.100.000	80,75
8.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.	2.675.749.000	2.620.900.950	97,95
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.			
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.	54.900.000	53.555.000	97,55
2.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.	40.250.000	39.000.000	96,89
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.			
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal.	156.252.000	132.353.993	84,71
2.	Mengikuti Workshop/Seminar.	75.000.000	66.884.406	89,18
3.	Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi.	75.000.000	70.972.562	94,63
4.	Kaji Banding Pelayanan Perizinan	200.000.000	194.698.709	97,35
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.			
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD.	5.500.000	3.146.400	57,21
2.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.	5.951.550	5.809.500	97,61
3.	Penyusunan LAKIP.	7.640.400	7.307.000	95,64
4.	Penyusunan Renja SOPD.	15.625.000	15.399.050	98,55

1	2	3	4	5
5.	Penyusunan Laporan Aktiva Tetap, Persediaan Barang dan Barang Pakai Habis.	5.000.000	4.840.400	96,81
6.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).	5.000.000	4.301.250	86,03
7.	Penyusunan Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ).	5.000.000	4.698.100	93,96
8.	Inventarisasi/Pendataan Barang Milik Daerah (BMD).	5.000.000	-	-
VI	<i>Program Pameran Promosi Investasi</i>			
1.	Pameran Promosi Investasi di Dalam Negeri	461.850.000	460.938.333	99,80
2.	Regional Investment Forum (RIF)	200.000.000	91.782.350	45,89
3.	Kalimantan Tengah Quality Expo.	188.150.000	174.552.600	92,77
4.	Kalimantan Tengah Trade Expo	100.000.000	91.385.257	91,39
5.	Gelar Karya Kalteng.	100.000.000	99.817.650	99,82
VII	<i>Program Capaian Realisasi Investasi.</i>			
1.	Evaluasi Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM).	310.000.000	290.052.274	93,57
2.	Satuan Tugas (Task Force) Penanaman Modal se Kalimantan Tengah	220.000.000	204.920.000	93,15
3.	Inventarisasi dan Evaluasi Fasilitas Barang Modal (Masterlist) yang di Import oleh Perusahaan PMA/ PMDN.	50.000.000	49.760.600	99,52
4.	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan PMA/ PMDN.	150.000.000	144.975.027	96,65
VIII	<i>Program Perencanaan dan Pengembangan Potensi Investasi Daerah</i>			
1.	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah se Kalteng.	100.000.000	100.000.000	100
2.	Mukor/KP3MN dengan IPMP/IPMK se Indonesia.	70.000.000	68.327.100	97,61

1	2	3	4	5
3.	Inventarisasi dan Pendataan Rencana Program dan Kegiatan.	50.000.000	47.741.200	95,48
4.	Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi.	1.100.000.000	1.076.313.177	97,85
5.	Mengikuti Pemutahiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID).	30.000.000	26.017.650	86,73
IX	<i>Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.</i>			
1.	Cek Lapangan ke Perusahaan dalam rangka Pelayanan Perizinan.	350.000.000	332.041.400	94,87
2.	Pendataan Jenis dan Jumlah Perijinan PMA/PMDN se Kalteng.	92.066.100	86.363.950	93,81
3.	Pengadaan SPP dan SOP untuk PTSP.	50.000.000	499.999.600	100
4.	Pelayanan Informasi PTSP dan Informasi Publik	238.308.600	237.675.600	99,73
5.	Forum/Sosialisasi PTSP di Bidang Penanaman Modal.	63.000.000	59.570.000	94,56
6.	Penyediaan Tenaga Pengelola PTSP.	1.486.000.000	1.109.383.444	74,66
7.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan.	35.000.000	34.088.400	97,40
8.	Pengadaan Videotron dan Content	851.680.000	835.390.011,15	98,09
9.	Pengadaan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan dan Server	1.529.890.000	773.684.670	50,57
TOTAL		17.003.713.273	15.125.635.087	88,95

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), Pemerintah Pusat telah melimpahkan kewenangan atas pelayanan kegiatan penanaman modal kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), maka jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 17 Sektor dengan penambahan dan perubahan jenis perizinan dan non perizinan sesuai Peraturan Menteri yang berlaku pada Instansi teknis.

Keterpaduan dalam proses pelayanan ini diharapkan akan lebih banyak memberikan pelayanan secara prima kepada investor, maka perlu ditingkatkan kemampuan teknis pelayanan aparatur agar lebih profesional, sehingga investor lebih tertarik lagi untuk menanamkan modal di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah yang membantu Gubernur Kalimantan Tengah untuk mewujudkan Kalimantan Tengah sebagai Daerah tujuan investasi yang aman dan menarik. Untuk kualitas aparatur, yang profesional sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

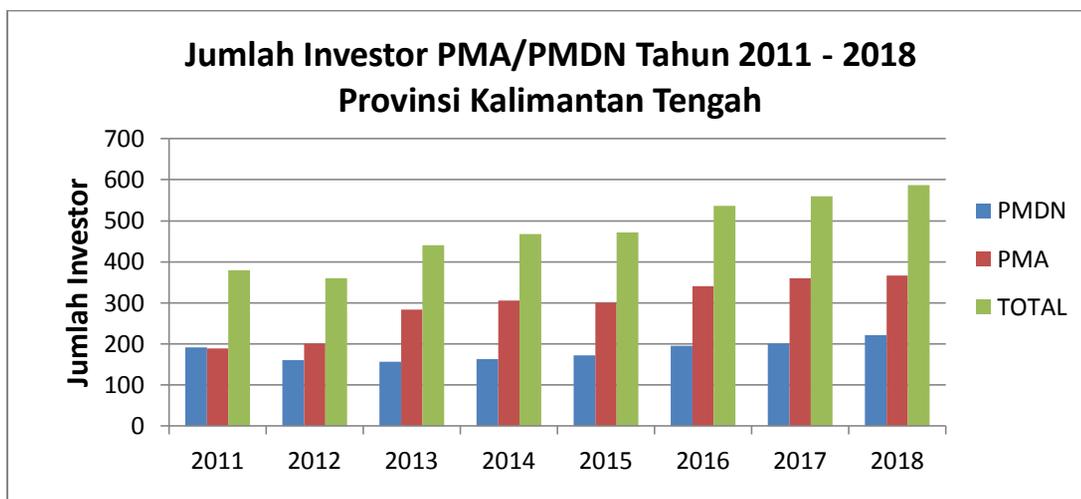
Pencapaian target kinerja dalam pelayanan SOPD adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Jumlah investor PMA/PMDN tahun 2011 – 2018
Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
2011	Jumlah Investor	191	189	380
2012	Jumlah Investor	160	200	360
2013	Jumlah Investor	157	283	440
2014	Jumlah Investor	163	305	468
2015	Jumlah Investor	172	300	472
2016	Jumlah Investor	195	341	536
2017	Jumlah Investor	200	360	560
2018	Jumlah Investor	221	366	587

Bagan 2.3

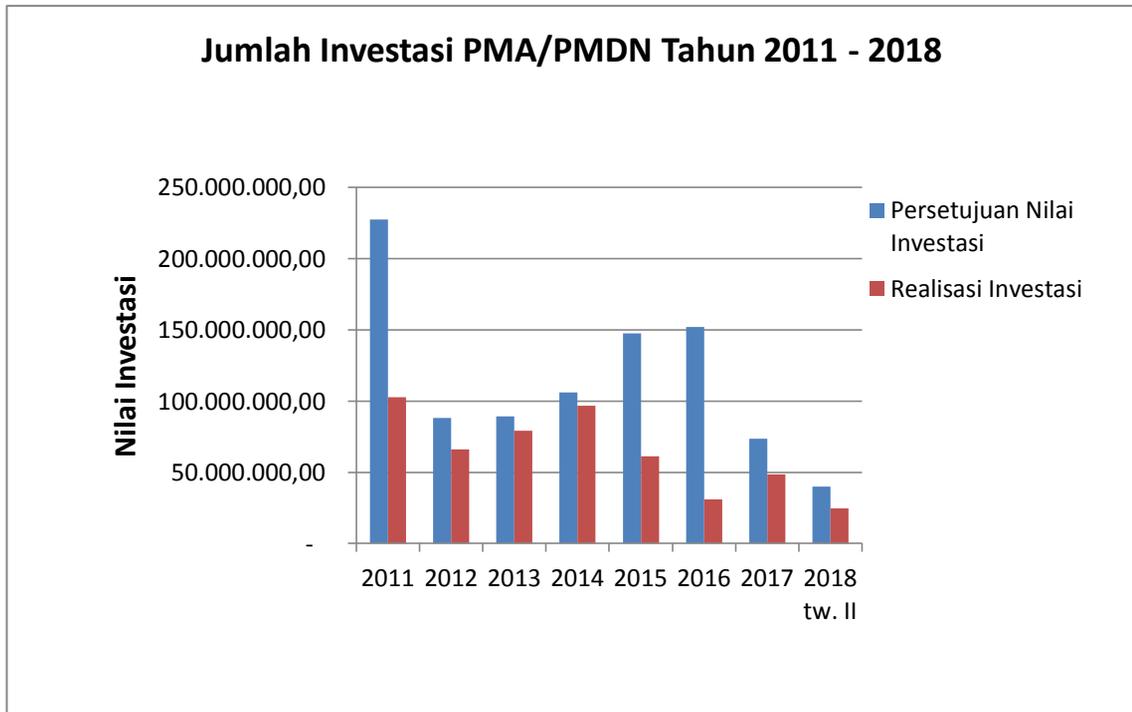


Tabel 2.4

Jumlah Investasi PMA/PMDN Tahun 2011-2018
Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2011	380	227.466.636,30	380	102.587.715,49
2012	420	88.014.166,14	420	66.159.424,97
2013	442	89.357.107,58	442	79.323.844,32
2014	468	106.072.075,90	468	96.835.668,92
2015	472	147.561.652,97	472	61.141.967,42
2016	520	152.000.000,00	520	30.984.644,31
2017	709	73.500.000,00	709	48.457.933,31
2018	791	40.000.000,00	793	24.556.548,81

Bagan 2.4



Untuk Capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	78,68	98,35
Jumlah Perizinan Yang Terbit Tepat Waktu	Izin	550	891	162
Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Unit	550	552	100
Jumlah nilai investasi berskala nasional	Rp. (juta)	75.357.828,18	24.556.548,81	32,58
- PMDN	Rp. (juta)	50.000.000,00	18.336.141,71	24,52
- PMA	Rp. (juta)	25.367.828,18	6.220.407,10	36,67
Jumlah Rasio Tenaga Kerja	%	34	156,69	373,96
Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN	Rp. (milyar)	57,55	36,67	63,72
Rata-rata capaian kinerja				138,43

Secara umum capaian indikator kinerja pada Tahun Anggaran 2018 telah mencapai target yang telah ditetapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain :

- 1) Sinkronisasi kerjasama di bidang penanaman modal antara pengusaha dengan pengusaha atau pemerintah dengan pemerintah maupun sebaliknya belum maksimal.
- 2) Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara berkala masih belum tepat waktu.

- 3) Belum tersedianya Database potensi unggulan daerah dari Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah antara lain :

- 1) Optimalisasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi serta penyediaan informasi pelayanan melalui website.
- 2) Peningkatan kualitas dan keahlian Sumber Daya Manusia secara profesional dalam pelayanan yaitu dengan mengikuti Diklat/Bimtek.
- 3) Pemantapan pelaporan LKPM secara online dan berkala dengan penguatan regulasi
- 4) Mensinergikan data peta potensi daerah masing-masing Kabupaten/Kota dengan Provinsi secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.6 lampiran dokumen ini.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat menjadi fokus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah dan merupakan program prioritas yang juga dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota se – Kalimantan Tengah. Oleh karena itu usulan kegiatan juga berfokus pada peningkatan mutu pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kriteria yang digunakan untuk memilih dan menilai usulan program dan kegiatan untuk RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018, yaitu :

- a. Program dan kegiatan terpilih harus merupakan kewenangan provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Program dan kegiatan yang dipilih merupakan program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat.
- c. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak yang faktual dihadapi.
- d. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk peningkatan pelayanan dan investasi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kesejahteraan bangsa yang diidamkan akan terwujud dengan meningkatnya kualitas hidup melalui pembangunan di segala bidang khususnya di bidang ekonomi. Pembangunan membutuhkan modal, keterampilan dan teknologi idealnya kebutuhan pembangunan ini dapat disediakan melalui sumber daya alam. Kenyataannya akumulasi modal dalam negeri masih belum efektif dan efisien, tingkat tabungan masyarakat masih rendah, demikian pula keterampilan serta penguasaan teknologi masih belum memadai untuk menunjang proses pembangunan yang diharapkan. Modal berikutan skill dan teknologi merupakan syarat bagi proses pembangunan. Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan modal pembangunan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dalam bentuk Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 dengan prioritas pengembangan potensi daerah yang mengacu pada 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman Modal yaitu : perbaikan iklim penanaman modal, pola umum pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif, penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment), mendorong persebaran penanaman modal, Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi serta promosi penanaman modal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pemetaan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan berupaya melakukan pelayanan secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel sehingga dapat menyusun dan merumuskan produk-produk yang berkualitas, yaitu berupa dokumen perizinan dan non perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.2.1. Tujuan

Dengan mengacu pada visi dan misi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi layanan terhadap calon investor dalam negeri atau luar negeri (PMA/PMDN) untuk menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Tengah melalui PTSP;
2. Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi dalam maupun luar negeri;
3. Meningkatkan kegiatan promosi dan kerjasama yang efektif dan efisien antara pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat; dan

4. Meningkatkan Profesionalisme bagi aparatur perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan penanaman modal agar bersinergi dengan Kabupaten/Kota.

3.2.2. Sasaran Rencana Kerja

Sasaran merupakan gambaran dan hasil yang ingin dicapai dalam waktu yang lebih pendek oleh suatu organisasi dengan perumusan lebih spesifik dan terukur. Artinya sasaran ini akan dapat tercapai atau terlihat hasilnya dalam jangka waktu yang ditentukan setelah program/kegiatan dilaksanakan atau dalam waktu satu tahun maupun semesteran.

Untuk mencapai 4 (empat) tujuan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah memfokuskan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun maupun semesteran antara lain :

- 1) Tersedianya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala;
- 2) Terwujudnya peningkatan kualitas, kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan terpadu satu pintu secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel;
- 3) Tersedianya kesepakatan data potensi unggulan daerah;
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang lebih representatif dalam melayani para investor/calon investor, dunia usaha serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait di bidang penanaman modal;

- 5) Terwujudnya sinergisitas dalam melaksanakan kegiatan promosi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang efektif dan efisien.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 dengan total Program sebanyak 9 Program dan 68 Kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Program

Program adalah rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Adapun Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 6) Program Pameran Promosi Investasi.
- 7) Program Capaian Realisasi Investasi.
- 8) Program Perencanaan dan Pengembangan Potensi Investasi Daerah
- 9) Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Informasi Publik.

2. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, sesuai program. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan untuk melaksanakan berbagai kebijakan tersebut diatas, maka dirumuskan/ disusun kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 yaitu :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 3) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah.
- 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- 7) Penyediaan Jasa Barang Cetak dan Penggandaan.
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- 11) Penyediaan Makanan dan Minuman.
- 12) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- 13) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
- 14) Rujukan Berobat PNS.

II. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur dengan kegiatan :

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
- 3) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
- 4) Pengadaan Mebeleur.
- 5) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
- 8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- 9) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
- 2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan:

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal.
- 2) Mengikuti Workshop / Seminar.
- 3) Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi
- 4) Rapat Koordinasi Teknis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan :

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 3) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP).
- 4) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
- 5) Penyusunan Laporan Aktiva Tetap, Persediaan Barang dan Barang Pakai Habis.
- 6) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
- 7) Penyusunan Laporan Kegiatan Peranggungjawaban (LKPJ).
- 8) Inventarisasi / Pendataan Barang Milik Daerah (BMD)

VI. Program Pameran Promosi Investasi dengan kegiatan:

- 1) Pameran Promosi Investasi di Dalam Negeri.
- 2) Regional Investment Forum (RIF).
- 3) Kalimantan Tengah Quality Expo.
- 4) Kalimantan Tengah Trade Expo.
- 5) Gelar Karya Kalteng.

VII. Program Capaian Realisasi Investasi dengan kegiatan :

- 1) Evaluasi Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM).
- 2) Satuan Tugas (Task Force) Penanaman Modal se Kalimantan Tengah.
- 3) Inventarisasi dan Evaluasi Fasilitas Barang Modal (Masterlist) yang diimport oleh Perusahaan (PMA/PMDN)
- 4) Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan PMA/PMDN.
- 5) Penyusunan Data Perkembangan Realisasi Penanaman Modal (PMA/PMDN)

VIII. Program Perencanaan dan Pengembangan Potensi Investasi Daerah dengan kegiatan :

- 1) Mengikuti sosialisasi program / kegiatan BKPM terkait dengan daerah.
- 2) Mukor/KP3MN dengan IPMP/IPMK se Indonesia.
- 3) Inventarisasi dan Pendataan Rencana Program Kegiatan.
- 4) Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi.
- 5) Sosialisasi Penyusunan Data Potensi Daerah.
- 6) Penyusunan leaflet, Booklet Profil dan Peluang Investasi.
- 7) Koordinasi Kebijakan / Regulasi Penanaman Modal.
- 8) Sosialisasi Mengenai Kebijakan Penanaman Modal.
- 9) Pendataan Produk Hukum yang dikeluarkan Kab./Kota se Kalimantan Tengah dalam Mendukung Penanaman Modal.
- 10) Inventarisasi Potensi Unggulan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
- 11) Mengikuti Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID).
- 12) Mengikuti Matchmaking BKPM.

IX. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Informasi Publik dengan kegiatan :

- 1) Cek Lapangan dalam rangka Proses Pelayanan Perizinan.

- 2) Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu.
- 3) Pengadaan SPP dan SOP untuk PTSP.
- 4) Konsultasi / Pertemuan-pertemuan tentang PTSP dengan Provinsi se Indonesia
- 5) Pelayanan Informasi PTSP dan Informasi Publik.
- 6) Penyediaan Tenaga Pengelola PTSP.
- 7) Koordinasi dan Fasilitasi Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan.
- 8) Pendataan Jenis dan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Wilayah Kalimantan Tengah.
- 9) Forum / Sosialisasi PTSP di Bidang Penanaman Modal.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan penjabaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.1 lampiran dokumen ini.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2020 ini merupakan penjabaran secara konkrit dan sistematis dari Program Pembangunan Daerah (Properda) Provinsi Kalimantan Tengah, Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Provinsi Kalimantan Tengah, Rencana Strategi (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah dan berdasarkan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara sinergi dalam pelaksanaannya.

Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dan sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Rencana Kerja SOPD ini disusun agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan yang telah terencana dengan baik dan sistematis bagi satuan organisasi yang akan melaksanakannya.